

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang dikenal selama ini diidentikkan dengan kedaulatan yang berarti bahwa rakyat adalah di atas segalanya (*power of the people*), dan tidak ada lembaga manapun yang dapat menghalangi kebebasan rakyat. Untuk lebih mewujudkan kedaulatan ada di tangan rakyat, maka telah dilakukan penataan undang-undang di bidang politik, dan menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, transparan, jujur dan adil. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Selama ini banyak sudah suara keluhan rakyat yang bertebaran ditanah air, karena rakyat sudah tidak diperdulikan lagi kepentingan mereka oleh para pejabat Negara, mereka selalu merasa dirugikan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pejabat Negara. Namun dinegara demokrasi ini, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Maka dari itu rakyat memiliki wakil-wakil mereka yang duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat, yang keanggotaannya terdiri dari partai-partai politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat,

Karena itu partai politik merupakan sarana yang sangat penting, fungsi dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang

partai politik harus benar-benar menjadi kerkuatan sosial politik yang hanya berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, maka perlu ditingkatkan kegiatan dan peranan partai politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang berorientasi kepada program-program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan nasional.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan Negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua dukungan itu diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokrasi, jujur, adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan adanya lembaga pemilihan umum maka sangatlah penting bagi masyarakat untuk dapat mengeluarkan pendapatnya dan mengembangkan kehidupan demokrasi sehingga dapat mengeluarkan semua aliran yang ada dalam Negara.

Pemilihan umum diselenggarakan atau dilaksanakan atas prinsip demokrasi dan transparan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pembangunan politik harus makin meningkatkan kualitas pendidikan politik meningkatkan peran serta politik masyarakat dalam berbangsa dan

Dalam menyalurkan aspirasi dan perjuangan membela hak dan kepentingan rakyat, maka wakil-wakil mereka harus mendapat tempat yang wajar dalam konstelasi kenegaraan. Untuk itu suasana keterbukaan dan kejujuran dalam mengembangkan demokrasi pancasila sangat diperlukan, maka dari itu semua partai berkeyakinan bahwa demokrasi pancasila hanya dapat ditegakkan atas Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan atas Negara kekuasaan (*machstaat*), kepatuhan atas aturan-aturan hukum hendaklah menjadi dasar tindakan baik oleh para penyelenggara Negara maupun rakyat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimanakah peranan partai politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat di DPRD Kota Yogyakarta”.

C. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi di dunia ini, rakyat memiliki peran penting dalam memilih siapa yang akan menjadi wakil mereka di pemerintahan. Menurut Giddens bahwa ”Demokrasi pada dasarnya mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan raja atau kaum bangsawan”¹

Sesuai ketentuan MPR Nomor IV / 1999 tentang GBHN arah kebijakan di bidang politik yang mengembangkan system politik nasional yang berkedaulatan

¹ Abdul Ghofir, 2002, *Demokrasi Yogyakarta*, Pustaka Pelajar, hlm. 15

rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.

Dengan demikian rakyat memiliki kebebasan dan persamaan di dalam mengemukakan pendapat terhadap kebijakan Negara sebagai bentuk kekuasaan rakyat di dalam pemerintahan. Pembangunan bidang politik melalui proses pembaharuan kehidupan politik terutama dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah mampu menetapkan terciptanya stabilitas nasional di bidang politik.

Walaupun demikian pengalaman budaya politik Pancasila terutama menyangkut etika dan moral politik, serta kegiatan pendidikan politik masih memerlukan perhatian terhadap berfungsinya secara mantap supra dan infra struktur politik, termasuk mekanisme partai politik yang terkait pada sikap keterbukaan yang bertanggung jawab dan berlandaskan demokrasi Pancasila.

Dengan sistem politik, komunikasi berfungsi menjembatani antara situasi politik yang ada pada supra struktur politik dan infra stuktur politik yang sekaligus menciptakan kondisi politik yang stabil, secara eksternal komunikasi politik, membahas hubungan timbal balik antara Negara satu dengan Negara lainya.

Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap organisasi. Untuk mendapatkan kejelasan tentang pengertian partai politik seperti

yang dikutip oleh para ahli, yang menjelaskan pengertian dari partai politik, adalah sebagai berikut:

Joseph Lapalomba dan Myron Weiner berpendapat bahwa partai politik merupakan *a creatur of modern and modernizing political system*, partai politik bisa diuraikan sebagai berikut, *pertama*, merupakan salah satu indikator gejala modernisasi masyarakat, dimana telah terjadi ledakan partisipasi masyarakat dan pemindahan hak-hak politik kepada masyarakat semakin luas. *Kedua*, dimana partai politik berkaitan dengan krisis yang terjadi didalam suatu masyarakat²

Menurut Carl j Friedrich, yang dimaksud dengan partai politik adalah, “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partai kemanfaatan yang bersifat materil”.³

Sedangkan Raymond Girfield Gehel berpandangan bahwa, “partai politik adalah terdiri dari sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi. Pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.”⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bahwa partai politik adalah suatu interaksi antara satu orang dengan orang lain untuk menjalin suatu pengertian yang sama atas gagasan, pesan, ide untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan

² Koirudin, 2004, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 64

³ Miriam Budiharjo, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 161

⁴ G. J. Friedrich, 1963, *Demokrasi dan Partai Politik*, Jakarta, Gadjah Mada, hlm. 111-112

demikian partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama.

Bila komunikasi dan politik di kaitkan dengan komunikasi politik, menurut Astrid S. Susanto sebagai berikut: “komunikasi politik adalah komunikasi politik yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.”⁵

Dilihat dari tujuan politik maka hakikat partai politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam menguasai dan memperoleh kekuasaan. Selain mempunyai peran yang sangat penting partai politik juga menentukan keberhasilan pembangunan sistem demokrasi, yang berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Negara demokrasi perlemen sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, demokrasi pada mulanya merupakan suatu gagasan tentang pola kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang tidak manusiawi di tengah-tengah masyarakat, reaksi tersebut datangnya dari orang-orang yang berfikir idealis dan bijaksana. Mereka terusik dan tergugah oleh adanya pengekanan dan pemeriksaan hak-hak dasar manusiawi.

Perulian Donald dan Luhut MP Pangaribuan mengatakan:

“ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Dalam kenyataan

⁵ Astrid S. Susanto Dan Phill, 1998. *Komunikasi Sosial Di Indonesia*. Jakarta, Bina Cipta, hlm. 2

“ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Dalam kenyataan hidup ide tersebut direalisasikan melalui simbol-simbol dan hakikat dari nilai-nilai dasar demokrasi tersebut. Itu berarti bahwa simbol demokrasi dan begitu pula makna dan hakekat demokrasi sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri”.⁶

Ide demokrasi yang ada awalnya dimaksud sebagai pola hubungan antar manusia yang manusiawi secara ideal. Lalu berproses dan kemudian lebih populer dalam wujud kehidupan yang lebih luas yakni kehidupan bernegara.

Dalam ilmu politik dikenal pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatife. Dalam pemahaman secara normatife demokrasi merupakan suatu yang ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah Negara. Seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing Negara. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintah Indonesia.

Begitu juga dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang”.

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Pendapat dan aspirasi rakyat akan hilang apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain

⁶ Rosalia Donald dan Lukman M.P. Darsanibana, 1997, *Manajemen Partai*, Jakarta, Pustaka Sinar

uang sama. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan”. Setelah digabung kemudian aspirasi ini dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” semua kegiatan ini dilakukan oleh partai, selanjutnya partai politik merumuskan sebagai kebijaksanaan kemudian dimasukan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan partai politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat di DPRD Kota Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya ilmu hukum tata Negara yang semakin komplek
- b. untuk pengembangan lebih lanjut bagi ilmu Hukum Tata Negara terutama berkaitan dengan peranan partai politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat di DPRD Kota Yogyakarta

2. Bagi Pembangunan

- a. sebagai masukan yang positif bagi pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan nasional

- b. sebagai masukan bagi partai politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat di DPRD Kota Yogyakarta

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

- a. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan
- b. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, surat kabar atau majalah yang ada kaitanya dengan materi penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Wawancara
penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang dimaksud
- b. Studi pustaka
Penulis mencari data pustaka yang berkaitan dengan masalah, dengan cara melakukan studi pustaka

3. Lokasi Penelitian Dan Responden

- a. Penelitian dilakukan di DPRD Kota Yogyakarta
- b. Responden

- i. Ketua DPRD kota Yogyakarta
- ii. Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Kota Yogyakarta
- iii. Ketua Fraksi GOLKAR DPRD Kota Yogyakarta
- iv. Ketua Fraksi Demokrasi Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta
- v. Ketua Fraksi Demokrat dan Persatuan
- vi. Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang peranan partai politik dalam menyalurkan Aspirasi rakyat di DPRD Kota Yogyakarta

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif dengan pendekatan yuridis